

WACANA POLITIK PADA PIDATO ANGGOTA PARLEMEN INDONESIA TENTANG PENANGANAN COVID 19

Achmad Nashrudin Priatna¹

¹Universitas Bina Bangsa

Email: nashrudin.achmad@gmail.com

Abstrak

Komunikasi sebagai esensi dari interaksi antar manusia memegang peranan penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Adanya pandangan bahwa komunikasi itu mencakup politik, kiranya dapat dipahami, karena memang politik itu bersifat serba hadir (*ubiquitous*) dan multimakna. Komunikasi politik, dalam prakteknya dapat berwujud pidato, public speaking atau retorika. Dan bila membicarakan tentang komunikasi politik dengan aneka ragam bentuknya, perhatian kita akan tertuju pada aneka warna pidato anggota legislatif (dalam tulisan ini penulis menyebut anggota parlemen). Ada tiga indikator yang dianalisis, dengan menggubakan teori retorika Aristoteles yaitu Etos, pathos dan Logos. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang dinilai sebagai sebuah analisis tulisan terhadap kata-kata yang berkaitan dengan ide, gagasan, kepercayaan, perasaan, kebiasaan dan perilaku manusia Walliman dalam (Akbar, 2021). Analisis yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran bagaimana perspektif anggota parlemen (dengan istilah lain, anggota legislatif) memandang fungsi negara dan pemerintah didalam program vaksinasi covid 19. Sementara, teknik analisis data dalam penulisan artikel ini berangkat dari penjelasan (Creswell, 2014) yang memfokuskan analisa data melalui pengorganisasian data, pembacaan dan pencatatan, serta pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran (Agustino, 2020). Hasilnya adalah pidato anggota parlemen terhadap kebijakan penanganan Covid 19 di Indonesia sangat ditentukan oleh posisi mereka, apakah dari partai pendukung Pemerintah atau oposisi.

Kata kunci : parlemen, komunikasi politik, pidato, retorika, covid 19.

Abstract

Communication as the essence of interaction between people plays an important role in all aspects of life, including politics. The view that communication includes politics, presumably understandable, because politics is all-present (ubiquitous) and multi-dimensional. Political communication, in practice can take the form of speech, public speaking or rhetoric. And when it comes to political communication in its various forms, our attention will be drawn to the various colors of the speeches of legislators (in this paper the author mentions lawmakers). There are three indicators analyzed, by using Aristotle's rhetorical theory, namely Ethos, pathos and Logos. This paper uses a qualitative method which is considered as a written analysis of words related to ideas, ideas, beliefs, feelings, habits and behaviors of human Walliman in (Akbar, 2021). The analysis used by the authors is descriptive analytical to provide an overview of how the perspectives of lawmakers (in other terms, legislators) view the functioning of the state and government in the covid 19 vaccination program. Meanwhile, the data analysis technique in writing this article departs from an explanation (Creswell, 2014) which focuses on data analysis through data organization, reading and recording, as well as description, clarification, and interpretation (Agustino, 2020). The result is that MPs' speeches on Indonesia's Covid 19 handling policies are largely determined by their position, whether from government-supporting parties or the opposition.

Keywords : parliament, political communication, speech, rhetoric, covid 19.

PENDAHULUAN

Komunikasi sebagai esensi dari interaksi antar manusia memegang peranan penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Adanya pandangan bahwa komunikasi itu mencakup politik, kiranya dapat dipahami, karena memang politik itu bersifat serba hadir (ubiquitous) dan multimakna. Dalam setiap realitas kehidupan politik bisa dipastikan akan selalu terjadi komunikasi politik. Komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik (Cangara, 2011: 30). Komunikasi politik berperan menyambungkan semua bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan tersebut dikonversikan menjadi kebijaksanaan. Karena itu komunikasi politik secara keseluruhan tidak dapat dipahami, kecuali apabila dihubungkan dengan dimensi politik dalam segala aspek dan problematikanya. Bila komunikasi berjalan lancar, wajar, dan sehat, sistem politik akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan masyarakat sesuai dengan tuntunan zaman. Komunikasi politik berkaitan erat dengan system politik yang dianut sebuah negara. Komunikasi politik, seperti halnya di sisitem politik lainnya juga mutlak diperlukan dalam proses pembentukan pemerintahan (Fauzi, 2018).

Penanganan covid 19 tidak lepas dari hiruk pikuk komunikasi politik. Meski dalam hal penanganan Covid 19 di Indonesia memasuki situasi baru, seiring dengan kabar proses vaksin covid 19 sudah mulai menemukan titik terang. Bahwa proses uji klinis (fase 3) masih berlangsung, sehingga belum dapat dipastikan khasiatnya, pemerintah beranggapan bahwa pengadaan vaksin covid 19 perlu dilakukan segera sebagai langkah preventif penyediaan vaksin. Upaya preventif ini juga sebagai respon dimana semua negara berlomba-lomba memperebutkan vaksin ini agar ekonomi bisa segera bangkit dan warga menjadi pulih kembali (Ihsanuddin, 2020). Dalam bahasa sederhana tentang pembelian barang sebelum barang ada atau sedang berproses ini dikenal dengan istilah ijon. Indonesia meng-ijon vaksin covid 19 dari China melalui tiga perusahaan, yakni Cansino, G42/Sinopharm dan SinoVac . Konon, vaksin dari ketiga perusahaan ini sudah melakukan tes tahap tiga di berbagai negara. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang umum PBB pada 23 September 2020 menyatakan bahwa vaksin ini bakal menjadi pengubah

permainan (game changer) dalam upaya memerangi pandemi covid 19 (CNNIndonesia, 2020); (Tasnim, 2021).

Sikap optimisme kepala negara atas jalan yang akan ditempuh dalam memberantas penyebaran covid 19 yang tentu saja perlu dilihat bagaimana perwujudan kebijakan yang akan diambil nantinya. Soal vaksin covid 19 memang menjadi wacana kekinian yang kurang lebih ditunggu banyak orang, setelah dilanda pandemi covid 19. Virus ini berhasil memaksa setiap orang menahan diri dari aktivitas sosial. Virus ini juga berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bahkan, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah Gerth & Mills (Akbar, 2021). Pemerintah juga mengatur ketertiban terhadap masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dan karenanya diberikan kekuasaan memaksa MacIver (Akbar, 2021).

Meski ada kerangka pengamanan diri dan orang lain yang terus dikampanyekan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya, tetapi itu bukan dianggap solusi untuk menjalankan aktivitas sosial secara bebas. Dalam persoalan inilah Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi sentrum pandemi covid 19 setelah Wuhan (Sari, 2020) sebagai penilaian atas kelambanan pemerintah didalam menangani penyebaran.

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat besar. Negara ini memiliki sejarah sistem kepemimpinan yang dinamis. Sistem pemerintahannya pernah menganut sistem demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan pemerintahan otoriter hingga kembali ke demokrasi melalui proses reformasi yang bermula pada tahun 1998. Saat ini Indonesia diakui sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India (Indrayana dalam (Humaidi, 2016). Peringkat ini tentu tidak lepas dari jumlah penduduk Indonesia yang besar. Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia. Menurut perkiraan jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 juta. Masa pascareformasi tahun 1998 merupakan masa yang benar-benar berbeda. Reformasi menghadirkan perubahan UUD 1945 yang melahirkan konstitusi yang lebih demokratis (Humaidi, 2016). Sebagaimana dijelaskan Ghoffar dalam (Humaidi, 2016), hasil dari perubahan tersebut kalau dicermati telah terjadi pengurangan kekuasaan presiden. Namun, kekuasaan DPR sebaliknya semakin besar.

Kekuasaan Presiden dalam teori Trias politika adalah setara dengan Legislatif. Kedudukan antara Presiden sebagai kepala eksekutif dan DPR memiliki fungsi check and balance. Presiden adalah sebagai rule implementation (pelaksana undang) dan DPR sebagai rule making (pembuat undang-undang). Disamping Eksekutif dan Legislatif, terdapat Lembaga Ajudikasi atau disebut rule adjudication (Budiardjo, 2007); Syamsudin Haris dalam (Parlemen, 2011).

Salah satu pendukung keberhasilan dalam mempertahankan masa kepemimpinan pada era demokrasi ialah keahlian mengomunikasikan ide, gagasan, dan pikirannya kepada masyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, berbagai tanggapan negatif dapat bermunculan terhadap kebijakan yang dibuat.

Namun demikian dalam penanggulangan pandemic Covid 19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah dengan program vaksinasi. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak semua mendukung. Ada beberapa pihak menyatakan kritikan, sehingga dalam program vaksinasi menimbulkan berbagai kontroversi, mulai dari halal haram vaksin, vaksin belum teruji, bisnis vaksin sampai vaksin palsu. Kritikan tersebut muncul dari mereka yang selama ini dikenal sebagai pihak oposisi (Achmad et al., 2021).

Pro dan kontra dalam sebuah entitas politik adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Pro dan kontra ditampilkan oleh anggota parlemen yang berada pada kubu yang berbeda. Penulis menyebutnya kubu pro pemerintah, atau partai pengusung presiden yang berkuasa, dan kubu yang tidak mendukung pemerintah, atau biasa disebut oposan. Oposan adalah kubu atau kelompok yang berseberangan secara politik. Wacana yang dibentuk biasanya terjadi di dalam dan diluar parlemen. Berbagai pidato, atau pernyataan di olah sedemikian rupa dalam bentuk retorika (Martin, 2020).

Sebagaimana disinggung di atas bahwa pidato atau public speaking atau retorika merupakan kegiatan berkomunikasi (Ayuningtias & Hartanto, 2014). Meski tidak semua orang bisa melakukan public speang (atau bicara didepan public) dengan tanpa kecemasan atau kekhawatiran. Kecemasan secara psikologis akan mempengaruhi kualitas efek yang diharapkan (Gallego et al., 2021). Namun Kegiatan berkomunikasi dapat terlihat dalam wujud kegiatan bertutur yang selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku bertutur dalam kehidupan

mempunyai maksud dan tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perilaku bertutur membutuhkan bahasa. Dilihat dari sudut penutur, maka bahasa itu berfungsi personal atau pribadi. Maksudnya, penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturan. Pada lain hal, kegiatan bertutur ini juga bisa terlihat pada dunia politik khususnya acara kampanye, pemilihan pemimpin suatu organisasi, dan banyak lagi.

Bentuk komunikasi yang sering dilihat pada actor politik adalah pidato. Dalam berorasi atau berpidato, khususnya dalam pidato politik, seorang aktor politik mengemban tugas baik sebagai anggota parlemen atau ketika menjalankan fungsi dari partainya (Ayuningtias & Hartanto, 2014). Pemakaian bahasa dalam pidato politik juga berpengaruh dalam menjalankan fungsinya tersebut. Karena bahasa tidaklah netral, tetapi tergantung siapa yang menggunakan atau menyampaikannya maka penulisan tentang penggunaan bahasa dalam pidato politik menarik dan penting untuk dilakukan.

Persepsi dan opini umum biasanya tergambar saat aktor politik menjalankan fungsinya baik sebagai anggota parlemen dari partai yang diwakilinya dan secara dominan dibentuk melalui pemakaian bahasa dalam suatu pidato atau orasi politik. Seperti yang telah disebutkan bahwa bahasa tidaklah netral, maka dari pemakaian bahasa tersebut dapat dilihat elemen-elemen ideologi yang dibawa. Apabila ideologi didefinisikan sebagai konstruksi atas realitas yang dibangun melalui berbagai bentuk diskursif praktis maka bahasa akan menjadi diskursif. Dengan demikian elemen-elemen pemakaian bahasa dalam kaitannya dengan ideologi yang dibawa dan fungsi yang diperankannya serta hubungan kekuasaan (power relations) yang dibentuk oleh tokoh politik di Indonesia dalam pidato politiknya penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Esbaugh (Eshbaugh-Soha, 2010), Pidato yang merupakan pusat dari strategi pemerintahan dalam literatur politik Amerika. Presiden menggunakan pidato untuk mengomunikasikan preferensi kebijakan mereka kepada legislator dan birokrat, berbicara kepada publik pada saat perselisihan internasional atau domestik.

Pidato selain sebagai bagian dari telaah komunikasi juga merupakan salah satu Kecakapan yang dibutuhkan oleh beberapa profesi demi menunjang karirnya. Salah satu profesi yang membutuhkan kemampuan komunikasi adalah anggota parlemen, atau anggota legislative kemampuan pidato. Pidato menurut KBBI online (2016) adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak; wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Dalam sebutan lain adalah public speaking.

Istilah lain yang sering dipersamakan dengan pidato dan public speaking adalah retorika. Pada artikel ini penulis menyamakan makna pidato dengan public speaking, atau berbicara di depan khalayak. Karena pidato atau public speaking adalah kegiatan (ber)komunikasi, maka istilah lain yang bisa dipersamakan dengan orang yang melakukan aktifitas pidato, atau public speaker adalah komunikator politik. Mirza Shahreza (Shahreza, 2017) menyebutkan bahwa komunikator politik adalah orang yang menyampaikan pesan politik. atau dengan kata lain, komunikator politik adalah orang yang melakukan aktifitas komunikasi politik.

Menurut Menurut Gurevitch dan Blumler (Shahreza, 2017), menjelaskan bahwa dalam arti yang luas, komponen-komponen utama dari suatu sistem komunikasi politik ditemukan pada: (1) Lembaga-lembaga politik dalam aspek-aspek komunikasinya, (2) Institusi-institusi media dalam aspek-aspek politiknya, (3) Orientasi khalayak terhadap komunikasi politik, (4) Aspek-aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi.

Setiap orang boleh dan berhak menyampaikan perihal politik. Tetapi sedikit hanya sedikit yang konsisten melakukannya. Walaupun sedikit para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini public (Shahreza, 2017).

Selain istilah Pidato, Komunikasi politik, public speaking, istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut berbicara di depan public adalah retorika, sebagaimana dibahas dalam artikel yang ditulis James Martin (Martin, 2020) (Sayu Kadek Jelantik, 2020). Tindakan atau kegiatan berbicara di depan umum (public) merupakan hal yang biasa dilakukan oleh aktor politik, seperti anggota parlemen atau senator.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisis aktifitas berbicara di depan public (berpidato, public speaking, beretorika atau komunikasi politik) dalam beberapa perspektif. Yaitu perspektif teori retorika, teori komunikasi dan teori public speaking.

LITERATUR

Parlemen

Tengoklah wajah parlemen kita dari hari ke hari kita disuguhi maraknya kasus korupsi yang melibatkan para anggota Dewan Kita menyaksikan pula mengemukanya atau hilangnya kasus kasus besar seperti kasus Century bukan didasarkan atas pertimbangan keadilan atau penegakan hukum melainkan lebih dilatarbelakangi pertimbangan bargaining politik dan kepentingan jangka pendek kalangan elite politik Di depan mata kita para politisi senantiasa sibuk berpikir tentang suksesi kepemimpinan Seakan akan politik hanya menjadi ajang untuk memperkaya diri dan saling menjatuhkan Jauh dari etika dan moral politik yang sehat Nyata sudah bahwa energi politik kita dewasa ini nyatanya dihabiskan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok Di sisi lain pelbagai persoalan bangsa mulai dari perampokan kekayaan negara oleh asing meluasnya korupsi dari pusat hingga ke daerah masalah kemiskinan krisis pangan dan lain lain menjadi terabaikan padahal segenap itulah yang mestinya menjadi fokus perhatian yang harus diselesaikan (Parlemen, 2011).

Pelbagai kasus yang menambah sisi gelap parlemen kita di level pusat maupun daerah seakan akan hendak menggugurkan tesis Max Weber bahwa politikus harus menyadari bahwa politik adalah tugas jabatan dan panggilan hidup Memang para anggota legislatif tentu bukanlah nabi atau malaikat yang luput dari dosa dan tidak punya hawa nafsu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap tugas yang dilaksanakan Akan tetapi para politikus sebagai anggota dewan harus mampu menjaga kehormatan dirinya lewat pelaksanaan tugas yang menjadikan etika dan moralitas baik sebagai pijakan maupun sebagai tujuan Etik moral politik parlemen tak pelak menghadapi dilema Parlemen secara ideal laksana Academy nya Plato yaitu lembaga politik tempat persemaian dan pertukaran pemikiran pemikiran brilian Mereka juga idealnya adalah kumpulan negarawan yang dengan kebajikannya mampu melahirkan gagasan gagasan yang

memberi pencerahan kepada masyarakat Sementara sebagai legal drafter para politisi di Senayan idealnya dituntut membuat undang undang yang dapat menjamin keadilan sosial kesejahteraan rakyat dan keteraturan hidup bermasyarakat Dan sebagai legislator mereka harus menjadi tempat rakyat mengartikulasikan aspirasi kepentingan Karena itu menjadi aneh jika dalam pelaksanaan tugas tugas mereka justru mengabaikan etika dan moralitas politik Parlemen sebagai medan transaksi nyata dalam kasus koalisi Hiruk pikuk politik antarpantai politik anggota koalisi kembali mengemuka

Retorika

Teori pertama adalah teori retorika. Indarti dalam Rizki, dkk (Rizki et al., 2019) menyebutkan bahwa Retorika adalah strategi yang digunakan penulis atau orang untuk menyampaikan ide melalui lisan dan tertulis. Ia juga digunakan untuk mengorganisasikan gagasan agar diterima oleh anggota masyarakat tertentu. Selain itu, dapat menjadi alat analisis lintas disiplin ilmu untuk mengungkap aspek-aspek tertentu dari wacana yang disampaikan. Wink dalam Rizki, dkk (Rizki et al., 2019) menyebutkan retorika adalah strategi untuk meyakinkan argumen dan juga untuk mengidentifikasi apa yang membuat argumen efektif atau tidak efektif.

Retorika terbagi menjadi tiga, ethos, pathos, dan logos (Sanjaya et al., 2018);(Higgins & Walker, 2012). Menurut pemikiran Nimmo (Nimmo, 2005) retorika politik berbeda dengan propaganda dan periklanan. Retorika adalah komunikasi dua arah. Dewasa ini istilah retorika mengalami perkembangan dengan hadirnya istilah baru seperti speech communication atau public speaking. Retorika dalam dunia politik menjadi penting karena apa- bila seseorang dapat menerapkan dengan baik strategi retorika, maka dapat dipastikan orang tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Retorika dapat juga digunakan dalam berbagai hal, misalnya retorika kampanye dan retorika dalam berpolitik (Hardiyanti, 2013). Strategi dalam arti luas dan sempit terdiri dari tiga unsur, yakni tujuan (ends), sarana (means), dan cara (ways). Ketiga unsur tersebut menjelaskan bahwa strategi adalah cara yang digunakan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nasution, 2006).

Ethos mengacu pada personal atau proyeksi karakter dari komunikator. Ethos meliputi kredibilitas dan kepercayaan untuk meyakinkan orang-orang yang diajak berkomunikasi.

Beberapa karakter yang melekat pada ethos adalah similitude (kesamaan dengan orang lain), ingratiation (menjilat), deference (rasa hormat), expertise (keahlian), self-criticism (kritik pada diri sendiri), inclination to succeed (kecenderungan untuk sukses), dan consistency (konsistensi) (Higgins & Walker, 2012). Ethos mengacu pada karakter yang komunikator ingin untuk tampilkan. Pesan nonverbal seperti tampilan fisik, reputasi, cara menyampaikan pembicaraan masuk dalam strategi ethos (Sanjaya et al., 2018).

Pathos mengacu pada perasaan audiens sebagai efek persuasif. Pathos membangkitkan emosi khalayak, semisal kebahagiaan, kesedihan, kepuasan, kasihan, dan ketakutan. Untuk mempersuasif khalayak, komunikator terkadang menggunakan bahasa metafora (Higgins & Walker, 2012). Pathos dijelaskan sebagai suasana dari pidato yang menghidupkan gairah atau kemauan khalayak. Komunikator menghidupkan emosi dan empati khalayak melalui kebaikan-kebaikan semisal keadilan, kejujuran, semangat, keramahan, dan kebijaksanaan (Sanjaya et al., 2018).

Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen. Logos diidentifikasi dengan beberapa indikator seperti argumentation (argumentasi), logic (logika), warrants (jaminan), justifications (kebenaran), claims (klaim), data, evidence (bukti), dan examples (contoh) (Higgins & Walker, 2012).

Public Speaking

Public Speaking adalah kegiatan di depan publik. Tampil di depan publik untuk sekarang ini tampaknya menjadi bagian dari cat dan gaya hidup. Dalam kerangka pikir Maslow, barangkali ini bisa dikategorikan sebagai akhir atau puncak dari pengaktualisasian diri. Diakui atau tidak, kebutuhan akan aktualisasi diri ini menjadi kebutuhan semua orang. Semua orang ingin dirinya bisa mengaktualisasi: ingin dirinya diterima oleh publik. Persoalannya, walaupun tiap orang menginginkan semua itu, namun tidak semua orang tahu dan paham, bagaimana mengaktualisasikan dirinya melalui pidato (Fitri, 2016); (Pane, 2011)

Kajian Konsep dan Teori Public Speaking dan Komunikasi Politik Public Speaking adalah kegiatan berbicara di depan umum. Tujuannya adalah menyatakan pikiran, pendapat, ide dan gagasan atau guna memberikan gambaran tentang satu hal. Public Speaking biasanya digunakan

oleh seorang pemimpin untuk membangun opini, mengkomunikasikan kebijakan, memprovokasikan massa, menjual produk, meyakinkan klien, memberikan informasi dan lain-lain. Pendapat lama mengatakan bahwa pidato dianggap sebagai seni yang dapat dilakukan dengan baik oleh orang yang berbakat saja. Orang yang dikaruniai bakat berpidato memang ada dan jumlahnya tidak banyak. Namun, bakat saja tanpa disertai upaya belajar dan berlatih tidak akan berkembang. Bahasa Public Speaking adalah Bahasa untuk berbicara kepada orang banyak. Bahasa yang tidak diperoleh sejak lahir. Bahasa yang dikuasai oleh sebagian besar dari kita. Itulah sebab utama, mengapa banyak sekali orang mengalami rasa gugup dan takut saat harus berbicara di depan orang banyak. Saat harus melakukan Public Speaking . Rasa gugup dan takut, yang muncul karena tidak terbiasa dan tidak pernah secara sengaja memahami dan mempelajari fenomena Public Speaking. Padahal hampir setiap orang akan tampil sebagai public speaker, diberbagai dalam hidupnya. Di dalam dunia politik, di kantor sebagai pemimpin, di sekolah sebagai aktivis, di organisasi sebagai aktivis dan pengelola, sebagai pebisnis, penjual dan sebagai profesional. Public Speaking atau berbicara di depan umum sudah sangat tua usianya. Dari dulu sampai sekarang Public Speaking masih menjadi salah satu bagian kebudayaan umat manusia yang cukup dominan dalam menyampaikan informasi, menjelaskan ideide, menyebarkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya (Pane, 2011).

Paparan diatas menunjukkan bahwa Publik Speaking merupakan unsur penting dalam komunikasi politik disamping aspek komunikator, pesan, media, khalayak dan efek. Selain itu, bahasa juga menjadi salah satu bagian penting dalam kajian komunikasi politik karena penggunaan bahasa komunikator politik memiliki efek domino sampai pada unsur tingkat keterpilihan seseorang di lembaga legislatif maupun lembaga kepresidenan.

Komunikasi politik

Mirza Shahreza dan Korry Elyana (Syahreza & El-Yana, 2016) menyebutkan bahwa dalam praktiknya, komunikasi politik secara sengaja atau tidak sering menjadi pembicaraan atau obrolan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kadang-kadang terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Pada masa menjelang pemilu, baik pileg, pilpres maupun pilkada, hampir semua media ramai membicarakan berbagai hal yang terkait dengan persoalan

politik. Komunikasi politik berbeda dengan politik komunikasi; penempatan kata yang dipindahkan akan bermakna sangat berbeda dalam memahaminya. Komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan (politik) secara sirkular dari pengirim (komunikator politik) kepada penerima (komunikan), audience atau khayalak politik. Pesan-pesan yang disampaikan tersebut terkait dengan pengaruh, kekuasaan, kewenangan, nilai, ideologi, kebijakan umum, distribusi kekuasaan dan lain sebagainya.

Mengomunikasikan politik tanpa aksi politik yang konkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: pedagang sayur, mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung dan lain sebagainya. Berbicara tentang komunikasi politik (political communication), perhatian kita akan langsung tertuju pada konsep komunikasi dan politik. Dengan demikian, pengertian utama komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi organisasi karena dapat terjadi di lembaga resmi atau formal (antara atasan dan bawahan secara vertikal atau antarsesama politisi di dunia politik secara horizontal) (Syahreza & El-Yana, 2016).

Secara umum, tujuan komunikasi politik adalah menyampaikan pesan-pesan politik dalam suatu sistem politik tertentu (negara) oleh komunikator politik kepada komunikan politik. Secara khusus, para ilmuwan memberi batasan yang eksplisit tentang tujuan komunikasi politik sebagaimana berikut ini.

1). Citra Politik

Komunikasi tidak secara langsung bisa menimbulkan pendapat dan perilaku tertentu, tetapi cenderung memengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan. Citra (image) ialah gambaran seseorang (figure) yang tersusun melalui persepsi yang bermakna melalui kepercayaan, nilai dan pengharapan (Arifin, 1992). Menurut Nimmo (Nimmo, 2005), citra politik terjalin melalui pikiran dan perasaan secara subjektif yang akan memberi penilaian dan pemahaman terhadap peristiwa politik tertentu.

2). Pendapat Umum

Dikenal pada awal abad ke-18, pendapat umum adalah hasil interaksi antara orang-orang di dalam suatu kelompok, atau sikap rakyat mengenai sesuatu masalah yang menyangkut kepentingan umum. Pendapat umum dicirikan: (a) pendapat, sikap, perasaan, ramalan, pendirian dan harapan- harapan dari individu, kelompok dalam masyarakat tentang masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan sosial; (b) hasil interaksi, diskusi atau penilaian sosial antarindividu berdasarkan pertukaran pikiran secara sadar dan rasional; (c) pendapat umum dapat dikembangkan, diubah dan dibentuk media massa; dan (d) bisa dilakukan pada penganut paham demokrasi Varma dalam Shahreza dan Elyana (Syahreza & El-Yana, 2016).

3). Partisipasi Politik

Perhatian dari warga negara yang berupaya menyampaikan kepentingannya kepada penguasa. Budiardjo dalam (Syahreza & El-Yana, 2016) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut aktif dalam memilih pimpinan negara dan kegiatan yang secara langsung atau tak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson (Huntington, 1994), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi/kolektif dengan tujuan memengaruhi pemerintah (pembuatan keputusan), baik itu dilakukan secara spontan atau terorganisir, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal maupun efektif atau tidak efektif. Tindakan tersebut dapat berupa: (a) agregasi kepentingan, yaitu sebuah penggabungan kepentingan untuk kemudian dirumuskan dan disalurkan pada pemegang kekuasaan atau pemerintah untuk dijadikan kebijakan publik; (b) artikulasi kepentingan (interest articulation function) di mana terjadi proses sintesis terhadap aspirasi individu-individu sebagai anggota kelompok berupa ide atau pendapat yang kemudian dijadikan pola dan program politik.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan tulisan kualitatif yang oleh Nicholas Walliman dinilai sebagai sebuah analisis tulisan terhadap kata-kata yang berkaitan dengan ide, gagasan, kepercayaan, perasaan, kebiasaan dan perilaku manusia Walliman dalam (Akbar, 2021). Analisis yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran bagaimana

perspektif anggota parlemen (dengan istilah lain, anggota legislaiif) memandang fungsi negara dan pemerintah didalam program vaksinasi covid 19. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (sekunder) dengan menelaah sumber – sumber dari berbagai literatur seperti jurnal, buku, dokumen, website, media, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Tracy dalam Rahayu (Eka Sanhadi Rahayu, 2018), metode deskriptif kualitatif dalam melakukan penulisan karena datanya berupa kata-kata bukan angka. Deskriptif kualitatif adalah jenis penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Dalam melakukan penulisan, penulis adalah instrumen kunci yang memiliki pengetahuan semua tentang studi. Sebagai instrumen kunci penulis adalah orang yang mengumpulkan data, kemudian mereduksi data tersebut agar lebih fokus dan lebih mudah untuk dianalisis. Sementara, teknik analisis data dalam penulisan artikel ini berangkat dari penjelasan Creswell (2014) yang memfokuskan analisa data melalui pengorganisasian data, pembacaan dan pencatatan, serta pendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran (Agustino, 2020).

Penulis menampilkan data yang siap untuk disimpulkan dan diverifikasi sebagai langkah selanjutnya. Penulisan ini mencoba mendeskripsikan kekuatan persuasif yang dicerminkan oleh penggunaan gaya retorika terjadi dalam pidato (retorika, public speaking, komunikasi politik) anggota parlemen.

Selain itu, penulis menggunakan kritik retorik untuk mengungkap temuan penulisan ini. Kritik retorik adalah metode sistematis untuk menggambarkan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi kekuatan persuasif pesan yang tertanam dalam teks (Frey et al., dalam (Eka Sanhadi Rahayu, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidato yang disampaikan oleh anggota parlemen, sebagai sebuah komunikasi politik, dengan sendirinya bermuatan politik (Syahreza & El-Yana, 2016). Dalam pidato seorang anggota parlemen setidaknya menyebabkan atau sedang melakukan pencitraan, membentuk opini public dan sebagai bentuk partisipasi politik.

Disisi lain pidato terutama yang mewacanakan politik, bisa dilihat dari seni beretorika. Suatu retorika setidaknya memiliki tiga komponen penting, yaitu pathos, ethos dan logos (Sanjaya et al., 2018).

Baik pidato, retorika, bisa dipastikan dilakukan dan disampaikan ke dan untuk halayak umum (public). dengan demikian aktifitas pidato, retorika adalah bentuk public speaking, karena disampaikan ke dan untuk public lihat (Fitri, 2016); (Pane, 2011).

Untuk memudahkan analisis pada artikel ini, penulis membatasi ruanglingkup nya pada aspek ethos, pathos, dan logos. Subjeknya adalah pandangan mereka tentang pandemic Covid 19, termasuk respons terhadap kebijakan Pemerintah.

Contoh pidato :

- *Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memperhatikan temuan Tim LapoCovid-19 tentang banyaknya pasien isolasi mandiri (Isoman) yang meninggal dunia tanpa tersentuh layanan kesehatan.*

Sumber

*:
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33899/t/Anggota+DPR+Desak+Pemerintah+Respon+Temuan+Tim+LaporCovid-19>*

"Berdasarkan temuan Tim LapoCovid-19 terdapat 2.313 pasien isoman Covid-19 yang meninggal dunia di luar rumah sakit. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, temuan ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam penanganan orang yang terpapar. Apalagi, data yang disampaikan tersebut bisa saja berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah," kata Saleh melalui rilis yang diterima Parlemetaria, Jumat (23/7/2021).

Menurut Saleh, temuan tersebut menunjukkan beberapa titik lemah penanganan Covid di Indonesia. Pertama, rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak mampu menampung semua yang terpapar. Terbukti, banyaknya yang dirawat di luar rumah sakit.

"Yang meninggal saja kan jumlahnya mencapai 2.313. Pasti jumlah yang isoman berkali-kali lipat dari jumlah itu. Kebanyakan dari mereka itu memilih isoman karena tidak tertampung di rumah-rumah sakit dan faskes-faskes yang ada,"

"Kita sangat sedih melihat fakta ini. Sebab, mereka yang mendapat perhatian dan pengobatan serius pun banyak yang tidak bisa tertolong. Apalagi yang tidak diperhatikan dan tidak menerima pengobatan yang memadai,"

Jika memperhatikan statement Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, berdasarkan indikator Retorika, aspek Pathos dan logos lebih mengemuka. Seperti dalam kutipan pidatong *"Berdasarkan temuan Tim LaporCovid-19 terdapat 2.313 pasien isoman Covid-19 yang meninggal dunia di luar rumah sakit. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak"*. Konten pidato Saleh Daulay mengungkapkan data-data tentang kondisi korban Covid 19. Meski ada juga bagian yang berusaha mempersuasi peserta rapat di Komisi IX DPR tersebut dalam bentuk Logos, yang berbentuk justifications (kebenaran), dan claims (klaim), seperti terlihat pada kutipan *" temuan ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam penanganan orang yang terpapar"*.

- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan memperkuat sistem kesehatan nasional untuk meningkatkan respon kedaruratan pandemi Covid-19.

Sumber : <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33808/t/Respon+Kedaruratan+Covid-19%2C+DPR+Minta+Pemerintah+Perkuat+Sistem+Kesehatan+Nasional>

Hal itu diungkapkan Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, saat memimpin rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan RDP dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Penny K. Lukito di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2021).

"Kami minta pemerintah memperkuat sistem kesehatan nasional di tengah kedaruratan pandemi Covid-19 dengan memastikan kecukupan tempat tidur sakit, tempat tidur isolasi dan tempat tidur intensif (ICU), ventilator, oksigen, HFNC, obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan, termasuk penyediaan rumah sakit lapangan/darurat,"

Ninik juga meminta Kemenkes segera memperbaiki kebijakan penanganan pasien Covid-19 isolasi mandiri dengan memperhatikan seluruh masukan Anggota DPR, di antaranya memperluas penyediaan layanan *telemedicine*; membuat mekanisme bagi Isoman yang tidak bisa menjangkau *telemedicine*; hingga menyederhanakan prosedur dan persyaratan untuk mengakses bantuan obat pemerintah.

Pidato Ninik (politisi PKB) di atas berisi desakan atau persuasi agar Pemerintah dalam hal ini kementerian Kesehatan memperhatikan aspek-aspek penting dalam memperkuat sistem kesehatan nasional di tengah kedaruratan pandemi Covid-19. Sebagaimana dapat terlihat dalam kutipan pernyataannya "Kami minta pemerintah memperkuat sistem kesehatan nasional di tengah kedaruratan pandemi Covid-19 dengan memastikan kecukupan tempat tidur sakit, tempat tidur isolasi dan tempat tidur intensif (ICU), ventilator, oksigen, HFNC, obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan, termasuk penyediaan rumah sakit lapangan/darurat,"

Teks pidato di atas menunjukkan bahwa aspek Pathos, yang berisi membangkitkan emosi khalayak, menghidupkan gairah atau kemauan khalayak, menghidupkan emosi dan empati khalayak (Sanjaya et al., 2018).

- Contoh pidato lain berasal dari Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati menegaskan, kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus mendatang, perlu mendapat dukungan publik. Pasalnya, angka kasus Covid-19 masih tinggi per 2 Agustus lalu yang mencapai 523.164 orang.

Sumber :
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33993/t/Elva+Hartati%3A+Perpanjangan+PPKM+Perlu+Didukung>

“Kami terus mendorong seluruh sistem kesehatan terus bersiap dengan pemerintah memastikan tenaga kesehatan kita dijamin kesejahteraan dan keselamatannya. Pasokan obat, alat kesehatan dan oksigen harus dipastikan tersedia, sehingga mereka yang membutuhkan perawatan bisa sembuh,”

Dikemukakan Elva, laporan di daerah yang menerapkan PPKM Level 4, *Bed Occupancy Rate* (BOR) mengalami penurunan di sejumlah rumah sakit. Namun, pemerintah pusat dan daerah masih harus diingatkan bahwa *positivity rate* masih sangat tinggi, yaitu masih di atas 20 persen. Sementara rekomendasi WHO, *positivity rate*-nya harus di bawah 5 persen agar pandemi ini bisa dikendalikan.

Pidato yang disampaikan oleh Elva Hartati, dari FPD, adalah contoh dari retorika yang menampilkan aspek Logos. Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen., *justifications* (kebenaran), *claims* (klaim), *data, evidence* (bukti), dan *examples* (contoh) (Higgins & Walker, 2012).

- Contoh komunikasi politik lain disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021 oleh pemerintah. Menurutnya, evaluasi PPKM Darurat berbasis level harus menggunakan indikator dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sumber :
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34009/t/Kurniasih+Mufidayati%3A+Gunakan+Indikator+WHO+pada+Perpanjangan+PPKM+Level+4>

"Per 1 Agustus 2021 positive rate kita masih 27,28 persen. Masih pada kisaran yang sama pada saat pemberlakuan PPKM Darurat. Dengan angka positive rate masih tinggi, target testing juga harus naik menjadi 20:1000 per pekan. Semua indikator ini bisa jadi bahan evaluasi PPKM berbasis level".

"Sekarang sudah masuk bulan Agustus. Kendala terbesar kita masih soal ketersediaan. Pemerintah harus menggenjot berbagai skema pengadaan vaksin jika ingin tercapai target kekebalan kelompok sampai akhir tahun. Lalu apa kabar vaksin Merah Putih? Komisi IX sudah bulat berikan dukungan apapun yang dibutuhkan untuk vaksin Merah Putih guna membantu percepatan target vaksinasi nasional," papar Mufida.

Selain evaluasi berbasis data kesehatan dari WHO, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap pemerataan vaksinasi menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini jumlah penduduk yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua sebanyak 20.534.823 orang atau 9,86 persen dari target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720. Ia mengingatkan target tercapainya minimal 70 persen vaksinasi pada akhir 2021

Contoh retorika di atas memenuhi semua aspek baik etos, pathos maupun logos. Ciri bahwa pidato itu mengandung aspek Etos, dapat dilihat dari kutipan *"Per 1 Agustus 2021 positive rate kita masih 27,28 persen. Masih pada kisaran yang sama pada saat pemberlakuan PPKM Darurat. Dengan angka positive rate masih tinggi, target testing juga harus naik menjadi 20:1000 per pekan. Semua indikator ini bisa jadi bahan evaluasi PPKM berbasis level".*

Konten komunikasi politik ini mempertanyakan kredibilitas dan kepercayaan pada Pemerintah atas kebijakan perpanjangan PPKM darurat. Karena dianggap tidak ada perubahan yang berarti.

Aspek pathos terlihat pada kutipan *"Sekarang sudah masuk bulan Agustus. Kendala terbesar kita masih soal ketersediaan. Pemerintah harus menggenjot berbagai skema pengadaan vaksin jika ingin tercapai target kekebalan kelompok sampai akhir tahun. Lalu apa kabar vaksin Merah*

Putih? Komisi IX sudah bulat berikan dukungan apapun yang dibutuhkan untuk vaksin Merah Putih guna membantu percepatan target vaksinasi nasional,".

Statement di atas mempertanyakan dan mempersuasi khalayak dan mengandung methapora "apa kabar vaksi Merah Putih?".

Sedangkan aspek Logos nya dpat dilihat pada kutipan "Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per hari ini, masih ada 20 persen tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19. Di Maluku, angkanya sekitar 15 persen. Padahal, papar dia, angka kenaikan kasus di luar Jawa cukup tinggi dalam dua pekan terakhir. "Kenaikan kasus di luar Jawa dari 1-26 Juli mencapai 216 persen. Ini sudah menjadi peringatan. Segera genjot pengadaan vaksin dan lakukan pemerataan vaksinasi secara nasional,"

Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen (Higgins & Walker, 2012). Data yang dipaparkan Mufidayati mengandung konten mempertanyakan kejelasan program pemerintah sekaligus memperkuat argumen program PPKM yang tidak banyak membuahkan hasil.

- Pidato lain dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung kemudahan birokrasi izin masuk untuk alat-alat kesehatan yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut disampaikannya kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Dwi Teguh dalam lawatannya ke Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (3/8/2021). Dasco sendiri mengapresiasi Bea Cukai Tanjung Priok yang telah mengutamakan dan memudahkan izin produk-produk alkes masuk ke Indonesia.

Sumber:

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33990/t/Satgas+Lawan+Covid+DPR+Dukung+Kemudahan+Izin+Masuk+Produk+Alkes>

"Kami berupaya melakukan integrasi dan sinkronisasi mengenai barang-barang yang masuk. Sehingga kami apresiasi kepada pihak bea cukai yang telah memberikan kemudahan-

kemudahan peraturan untuk memasukkan barang kebutuhan untuk Covid seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung gas,”.

Pidato yang disampaikan oleh Sufmi Dasco Ahmad dari FGerindra, adalah contoh dari retorika yang menampilkan aspek Logos. Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen., justifications (kebenaran), claims (klaim), data, evidence (bukti), dan examples (contoh) (Higgins & Walker, 2012). Semua ciri tersebut memenuhi aspek Logos. Salah satu ciri pentingnya adalah statement Sufmi Dasco Ahmad memberikan justifikasi keberhasilan program pemerintah sekaligus claim dan contoh yang memperkuat statementnya.

- Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah warga untuk mendapat vaksinasi Covid-19. Namun, menurut Puan, kemudahan akses ini harus dibarengi dengan pasokan dan distribusi vaksin yang semakin lancar.

Sumber :

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34016/t/Ketua+DPR%3A+Sasaran+Makin+Luas%2C+Pasokan+Vaksin+Harus+Makin+Lancar>

“Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksin berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar”.

Pidato yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharami dari FPDI, adalah contoh dari retorika yang menampilkan aspek Logos. Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen., justifications (kebenaran), claims (klaim), data, evidence (bukti), dan examples (contoh) (Higgins & Walker, 2012). Semua ciri tersebut memenuhi aspek Logos. Salah satu ciri pentingnya adalah

statement Puan Maharani memberikan justifikasi keberhasilan program pemerintah sekaligus *claim* dan dukungan.

- Indonesia akhirnya keluar dari jebakan resesi yang membayangi perekonomian selama beberapa kuartal terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 telah berada pada zona positif yaitu 7,07 persen (yoy). Atas capaian tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah untuk pacu pemulihan ekonomi.

Sumber : <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34015/t/Ekonomi+Triwulan+II-2021+Tumbuh+Positif%2C+Puteri+Komarudin+Apresiasi+Kinerja+Pemerintah>

“Kita patut syukuri karena melalui kerja keras bersama antara pemerintah, DPR, industri, dan masyarakat, akhirnya kita bisa keluar dari resesi ekonomi. Bahkan capaian pertumbuhan pada kuartal ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2004 lalu. Hal ini tak hanya karena efek basis yang rendah (low base effect), tetapi memang kondisi ekonomi yang tengah menuju arah pembalikan seiring dukungan stimulus pemulihan ekonomi dan upaya pengendalian pandemi”.

Dijelaskan Puteri, sinyal positif perbaikan kinerja perekonomian ini tercermin dari sejumlah indikator. Diantaranya, Indeks Keyakinan Konsumen yang berada pada level optimis dengan skor 107,4 pada Juni 2021. Aktivitas manufaktur juga berada pada zona ekspansi ditunjukkan dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur di level 53,5 pada Juni lalu. Termasuk konsumsi listrik bagi industri dan bisnis yang tumbuh positif masing-masing 26,1 persen (yoy) dan 14,5 persen (yoy) pada bulan lalu.

Puteri juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga momentum ini agar tetap berlanjut pada kuartal-kuartal berikutnya. “Ke depan tentu akan penuh tantangan terutama dampak dari PPKM yang akan tercermin pada kuartal III nanti. Untuk mengatasinya, maka kita perlu optimalkan serapan anggaran PEN yang juga meningkat menjadi sebesar Rp744,75 triliun, guna

menjaga daya beli masyarakat, memacu pemulihan dunia usaha, serta mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity”.

Pidato yang disampaikan oleh Puteri Anetta Komarudin dari FPGolkar, merupakan contoh yang sarat akan aspek Etos dan Logos. Aspek Etos sesuai cirinya yaitu dapat dilihat Ethos mengacu pada personal proyeksi karakter dari komunikator. Ethos meliputi kredibilitas dan kepercayaan untuk meyakinkan orang-orang yang diajak berkomunikasi, inclination to succeed (kecenderungan untuk sukses) (Higgins & Walker, 2012). Ethos juga mengacu pada karakter yang komunikator ingin untuk tampilkan. Pesan nonverbal seperti tampilan fisik, reputasi, cara menyampaikan pembicaraan masuk dalam strategi ethos (Sanjaya et al., 2018).

Ciri-ciri aspek Etos dapat terlihat pada kalimat “Kita patut syukuri karena melalui kerja keras bersama antara pemerintah, DPR, industri, dan masyarakat, akhirnya kita bisa keluar dari resesi ekonomi. Bahkan capaian pertumbuhan pada kuartal ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2004 lalu. Hal ini tak hanya karena efek basis yang rendah (low base effect), tetapi memang kondisi ekonomi yang tengah menuju arah pembalikan seiring dukungan stimulus pemulihan ekonomi dan upaya pengendalian pandemi”.

Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen. Logos diidentifikasi dengan beberapa indikator seperti argumentation (argumentasi), logic (logika), warrants (jaminan), justifications (kebenaran), claims (klaim), data, evidence (bukti), dan examples (contoh) (Higgins & Walker, 2012).

Aspek logos dapat dilihat dari kalimat “Ke depan tentu akan penuh tantangan terutama dampak dari PPKM yang akan tercermin pada kuartal III nanti. Untuk mengatasinya, maka kita perlu optimalkan serapan anggaran PEN yang juga meningkat menjadi sebesar Rp744,75 triliun, guna menjaga daya beli masyarakat, memacu pemulihan dunia usaha, serta mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity”.

Kalimat tersebut menunjukkan isi pidato yang menyatakan membenaran (justifikasi) dan claim atas keberhasilan yang dicapai Pemerintah.

- Anggota DPR A.S. Sukawijaya menolak rencana pemberian fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel berbintang bagi kalangan legislator yang terpapar COVID-19. Menurut dia, anggota DPR bisa membayar sendiri biaya perawatan Covid-19 atau menjalani isolasi di rumah pribadi dan dinas.

Sumber : <https://www.merdeka.com/politik/demokrat-tolak-fasilitas-isoman-anggota-dpr-bisa-pakai-rumah-dinas.html>

"Rencana ini kurang tepat karena rata-rata anggota DPR mampu membayar sendiri dan bisa isoman di rumah pribadi atau di rumah dinas. Situasi seperti ini ada fasilitas seperti itu kurang tepat," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang akrab disapa Yoyok Sukawi dilansir Antara, Rabu (28/7).

Menurut dia, sebaiknya anggaran untuk fasilitas isoman diperuntukkan yang lebih bermanfaat, seperti membantu pengobatan masyarakat yang kurang mampu serta terdampak pandemi COVID-19.

"Lebih baik anggarannya untuk bantuan kepada rakyat yang isoman, saya ini kebetulan lagi di dapil dan memantau banyak yang kesulitan mengakses untuk membeli obat atau makanan pada saat isoman. Ini 'kan lebih urgent,"

Aturan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR tersebut tertuang dalam surat nomor SJ/09596/Setjen DPR RI/DA/07/2021 yang ditandatangani Sekjen DPR RI Indra Iskandar tertanggal 26 Juli 2021.

Pernyataan dari A.S. Sukawijaya dari FPDemokrat, memiliki ciri-ciri aspek retorika mirip dengan pernyataan yang dikemukakan Kurniasih Mufidayati dari FPKS.

Contoh retorika di atas memenuhi aspek baik etos, dan logos.

Ciri bahwa pidato itu mengandung aspek Etos, dapat dilihat dari kutipan Konten komunikasi politik ini yang mempertanyakan fasilitas isolasi mandiri yang eksklusif bagi anggota DPR. Dapat

dilihat pada kalimat, "Rencana ini kurang tepat karena rata-rata anggota DPR mampu membayar sendiri dan bisa isoman di rumah pribadi atau di rumah dinas. Situasi seperti ini ada fasilitas seperti itu kurang tepat,"

Konten pidato ini mempertanyakan komitmen terhadap rasa *emphatic* terhadap penderitaan rakyat. Rakyat atau masyarakat susah cari rumah sakit untuk isolasi dirawat, bahkan walaupun harus isolasi mandiri (*isoman*), belum tentu ketersediaan obat dan oksigen terpenuhi, ditambah lagi kemampuan finansial masyarakat yang semakin rendah karena ekonomi sedang sulit.

Sedangkan aspek *Logos* terlihat pada kutipan "Lebih baik anggarannya untuk bantuan kepada rakyat yang *isoman*, saya ini kebetulan lagi di dapil dan memantau banyak yang kesulitan mengakses untuk membeli obat atau makanan pada saat *isoman*. Ini 'kan lebih urgent,"

Statement di atas mempertanyakan dan mempersuasi khalayak dan mengandung *methapora* "Ini 'kan lebih urgent?".

Logos mengacu pada kejelasan dan integritas argumen (Higgins & Walker, 2012). Data yang dipaparkan Sukawijaya mengandung konten mempertanyakan bahwa uang untuk *isoman* anggota DPR lebih baik untuk membantu rakyat yang *isoman*, karena gaji anggota DPR cukup besar untuk membiayai sendiri *isoman*.

KESIMPULAN

Dari beberapa contoh cuplikan pidato yang terpilih berdasarkan pertimbangan tertentu (*purposive*) (Sugiyono, 2017), dapat disimpulkan:

1. Untuk memudahkan identifikasi dan analisis, maka artikel ini di analisis dengan menggunakan indikator retorika yang mengandung unsur *Ethos*, *Pathos* dan *Logos*.
2. Konten pidato yang dikemukakan oleh wakil rakyat terkait penanganan Covid 19, relative beragam, dari berbagai sumber, terutama dari web <https://www.dpr.go.id> dan dari koran merdeka <https://www.merdeka.com/politik>

3. Pemilihan pidato anggota parlemen berdasarkan wakil dari partai pengusung Pemerintahan Jokowi Makruf Amin (PDI, Golkar, Gerindra, PKB) dan oposisi (PKS dan Demokrat)
4. Konten pidato dari partai pengusung bercorak ethos, memuji, mendukung, mensupport. Pathos, dukungan dinuktikan dengan data dan mempersuasi masyarakat untuk respek kepada pemerintah
5. Konten pidato dari partai non pengusung bercorak ethos, mempertanyakan komitmen dan kebijakan. Pathos, pertanyaan tersebut ditunjukkan dengan data / bukti dan mempersuasi masyarakat . sedangkan Logos, mempertanyaan kebijakan yang kurang tepat dari Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Sulistyanto, A., & Jamil. (2021). Narasi Kritis Opinion Leader Dalam Kebijakan Vaksin Covid 19. *Jurnal Riset Dan Komunikasi*, 12(1), 38–54. <https://doi.org/DOI10.31506/JRK.V12i1.11601>
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. *Junal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.
- Akbar, I. (2021). Vaksinasi Covid-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 244–254.
- Ayuningtias, D. I., & Hartanto, E. Ci. S. (2014). Pidato Politik di Indonesia: Sebuah Kajian Wacana Kritis. *Prosodi*, VIII (1)(1), 25–38.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*: (Fourth edi). SAGE Publications.
- Eka Sanhadi Rahayu, F. (2018). *Famala Eka Sanhadi Rahayu-Persuasive Power as Reflected by Rhetorical Style in Political Speeches CaLLs*. 4, 115.
- Eshbaugh-Soha, M. (2010). The politics of presidential speeches. *Congress and the Presidency*, 37(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/07343460903390679>
- Fauzi, N. (2018). Political Communication of Legislative Candidate in Affecting Political Participation in the North Aceh District (Komunikasi Politik Calon Legislatif dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara). *Journal Pekommas*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030107>
- Fitri, D. (2016). *Analisis Kompetensi Public Speaking Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I*.
- Gallego, A., McHugh, L., Penttonen, M., & Lappalainen, R. (2021). Measuring Public Speaking

- Anxiety: Self-report, behavioral, and physiological. *Behavior Modification*.
<https://doi.org/10.1177/0145445521994308>
- Hardiyanti. (2013). Analisis Retorika dalam Kampanye Pemilukada DKI Jakarta 2012: Studi Kualitatif Analisis Retorika Jokowi-Ahok dalam Debat Kampanye Pemilukada DKI Jakarta. 2012. *FLOW*, 2(3), 1–11.
- Higgins, C., & Walker, R. (2012). Ethos, logos, pathos: Strategies of persuasion in social/environmental reports. *Accounting Forum*, 36(3), 194–208.
<https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.02.003>
- Humaidi, A. (2016). Struktur Teks, Kognisi Sosial, Dan Dimensi Sosial Pidato Susilo Bambang Yudhoyono. *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 2, 115–127.
- Huntington, S. P. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- Martin, J. (2020). Rhetoric, discourse and the hermeneutics of public speech. *Politics*.
<https://doi.org/10.1177/0263395720933779>
- Nasution, N. (2006). *Bobolnya Kandang Benteng: Sebuah Otokritik*. Suara Bebas.
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi politik : Komunikator, Pesan, dan Media*. Remaja Rosdakarya.
- Pane, I. (2011). Analisis Kemampuan Public Speaking Anggota Dprd Kota Makassar Masa Bakti 2009-2014. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 1(1), 43–65.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/369/226>
- Parlemen, P. (2011). *Menggugat politik parlemen*. 135.
- Rizki, I., Usman, B., Samad, I. A., Muslim, A., & Mahmud, M. (2019). Rhetorical pattern of political advertisement in Aceh. *Studies in English Language and Education*, 6(2), 212–227.
<https://doi.org/10.24815/siele.v6i2.13851>
- Sanjaya, A., Biyoga, S., & Alunaza, H. (2018). Pemimpin Minoritas dan Strategi Retorika Pathos dalam Kampanye: Analisis Isi Deskriptif Pesan Strategi Retorika dalam Facebook Kampanye Pemilihan Gubernur. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(2), 149–156.
<https://doi.org/10.7454/jki.v6i2.8917>
- Sayu Kadek Jelantik. (2020). Retorika Politik Calon Legislatif Hindu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Dalam Pemilihan Umum 2014. *Human Relations*, 3(1), 1–8.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/em_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.glo-bus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa
- Shahreza, M. (2017). Komunikator Politik Berdasarkan Teori Generasi. *Nyimak (Journal of Communication)*, 1(1), 33–48. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v1i1.273>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Syahreza, M., & El-Yana, K. (2016). *Etika dalm Komunikasi Politik*. 5, 1–62.
- Tasnim. (2021). Persepsi Masyarakat Tentang Vaksin Covid-19 Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. In *Yayasan Kita Menulis* (Vol. 58, Issue 12).
- Sari, H. P. (2020). Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir Pemerintah Artikel ini. Kompas.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/indonesia-disebut-berpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir>

<https://www.dpr.go.id>

<https://www.merdeka.com/politik>

CNN Indonesia. (2020, Maret 13). Banjir Hoaks Corona, Ahli Bicara Motif Politik hingga Sosial.

Retrieved from CNN Indonesia:

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200313084056-185-483058/banjir-hoaks-corona-ahli-bicara-motif-politik-hingga-sosial>, diakses pada 21 Juli 2021

CNN Indonesia (2020, Juli 20), Jokowi Bubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,

Retrieved from CNNIndonesia.com:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200720212317-20-526884/jokowi-bubarkan-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19>, diakses pada 21 Juli 2021.